

**SINERGI PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM
PEMUTAKHIRAN DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL
(STUDI PADA APLIKASI PENDATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KOTA MALANG REBORN)**

SKRIPSI



★ ★ ★ ★ ★
OLEH:
IKE ZHIANA HUZAINI
NPM 22201091048

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

HALAMAN JUDUL

SINERGI PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PEMUTAKHIRAN DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL (STUDI PADA APLIKASI PENDATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA MALANG REBORN)

SKRIPSI

Dibuat sebagai salah syarat untuk menyelesaikan studi S1
pada Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Islam Malang

Oleh:

IKE ZHIANA HUZAINI
NPM 22201091048

Pembimbing Utama

Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int.

Pembimbing Pendamping

Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP.

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”
(QS. Al-Baqarah:286)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”
(QS. Al-Insyirah:5)

“Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu, jadikan percikan tuk menempa tekadmu, jalan hidupmu hanya milikmu sendiri, rasakan nikmatnya hidupmu hari ini.”

(Hindia-Rasakan Nikmatnya Hidup)

“Pernah kau bayangkan tak takut melihat berita? Tak takut jadi dirimu yang seada-adanya? Tak takut punya mimpi yang lumayan agak gila? Berat tapi besok ada di tangan kita.”

(Hindia-Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah)

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**SINERGI PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PEMUTAKHIRAN
DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL
(STUDI PADA APLIKASI PENDATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KOTA MALANG REBORN)**

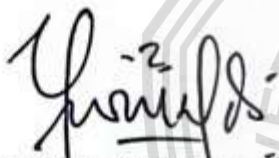
Telah disetujui untuk diujikan di hadapan Majelis Penguji

Malang, 12 Maret 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Hirshi Anadza, S.Hub. Int., M.Hub.Int.)
NPP. 161101198932138



(Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP.)
NPP. 191605199232105

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik



(Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP.)
NPP. 191605199232105

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**SINERGI PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PEMUTAKHIRAN
DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL
(STUDI PADA APLIKASI PENDATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KOTA MALANG REBORN)**

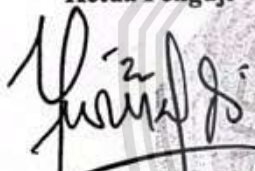
Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi dan telah dinyatakan

LULUS

Malang, 15 April 2026

Majelis Penguji

Ketua Penguji



(Hirshi Anadza, S.Hub. Int., M.Hub.Int.)

NPP. 161101198932138

Anggota Penguji 1



(Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP.)

NPP. 191605199232105

Anggota Penguji 2



(Dr. Suveno, S.Sos., M.AP)

NPP. 150209198832135

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi



(Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si.)

NPP. 21515061976321004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi saya yang berjudul, **“Sinergi Pemerintah Kota Malang dalam Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial (Studi pada Aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang Reborn)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya dapatkan (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 6 Maret 2026
Yang membuat pernyataan




Ike Zhiana Huzaini
NPM. 22201091048

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Mat Saleh dan Ibu Sumiyati, orang tua tercinta penulis. Karya ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti, cinta, dan rasa terima kasih.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sinergi Pemerintah Kota Malang dalam Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial (Studi pada Aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang Reborn)” dengan baik. *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya, yakni *addinul islam wal iman*.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Selain itu, skripsi ini juga menjadi bentuk dedikasi dan wujud perjuangan penulis dalam menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa perjalanan yang dilalui tidak selalu mudah. Berbagai tantangan seperti rasa jenuh, hambatan dalam proses penelitian, hingga beberapa kali perubahan topik penelitian menjadi bagian dari dinamika yang harus dilalui. Namun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang

telah memberikan dukungan dan menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Malang.
2. Bapak Dr. Affifudin, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang yang telah memberikan dukungan dan kemudahan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi.
3. Bapak Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan kebijaksanaan beliau dalam membimbing, serta atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyampaikan berbagai pemikiran dan kekhawatiran selama proses penyusunan skripsi. Melalui proses bimbingan tersebut, penulis memperoleh banyak pembelajaran, pengalaman, serta motivasi yang sangat berharga.
4. Bapak Hirshi Anadza, S.Hub. Int., M.Hub. Int. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta berbagai masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan

beliau dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan secara rutin setiap minggunya, sehingga penulis memperoleh banyak arahan, wawasan, serta motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Melalui bimbingan yang penuh kesabaran dan nasihat yang bijaksana, penulis mendapatkan banyak pembelajaran yang berharga selama proses penyusunan skripsi.

5. Bapak Didik Supriyanto, ST., S.Sos., M.Si. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Penulis menyampaikan terima kasih atas perhatian, nasihat, serta motivasi yang telah diberikan selama masa studi, sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan dengan baik hingga akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP selaku dosen penguji yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan evaluasi serta masukan yang konstruktif bagi perbaikan skripsi ini.
7. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Staf Tata Usaha Program Studi dan Humas Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang yang telah berkenan membantu penulis dalam berbagai proses administrasi, khususnya dalam pengurusan surat-menyurat, pendaftaran seminar proposal, sidang skripsi, hingga nantinya dalam proses pengurusan

kelulusan. Bantuan, pelayanan, serta kemudahan yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperlancar setiap tahapan penyelesaian studi.

8. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para informan dari berbagai instansi yakni Ibu Yenita Mirawanti selaku Ketua Tim Statistik Sosial BPS Kota Malang, Ibu Nurul Sri Hardiyanti, S.T., M.Sc., M.Eng. selaku Penelaah Teknis Kebijakan Bappeda Kota Malang, Ibu Ike Risty Rukmi Sukmasari, S.Sos. selaku Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinsos P3AP2KB Kota Malang, dan Ibu Fajar Izzatunni'mah S. selaku Statisi Ahli Pertama Diskominfo Kota Malang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi, data, serta berbagai penjelasan yang sangat dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Kesiediaan dan keterbukaan para informan dalam berbagi pengalaman serta pandangan sangat membantu penulis dalam memperoleh data yang akurat sehingga penelitian ini dapat tersusun dengan baik.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mat Saleh dan Ibu Sumiyati yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti, serta dukungan moral dan materiil kepada penulis. Segala pengorbanan, kesabaran, perhatian, dan kepercayaan yang diberikan selama ini menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tanpa doa dan dukungan yang tulus dari mereka, penulis menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan dapat dilalui dengan baik. Semoga Allah Swt. senantiasa

melimpahkan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, kemudahan urusan, serta keberkahan kepada kedua orang tua penulis, dan membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.

10. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Daylia, Bima, Fahmi, Aning, Nafisah, dan Rico atas dukungan, semangat, serta kesediaan mereka dalam menemani penulis sejak proses pengajuan judul, pelaksanaan seminar proposal, proses penelitian, hingga pelaksanaan ujian skripsi. Kehadiran dan perhatian yang diberikan menjadi motivasi serta penyemangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyelesaian skripsi. Semoga persahabatan yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik di masa yang akan datang, serta semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan dan kesuksesan dalam setiap langkah yang ditempuh oleh kita semua.
11. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dengan penuh kesabaran, ketekunan, serta semangat untuk terus melangkah meskipun menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap proses yang dilalui, mulai dari kebingungan, kelelahan, hingga rasa ragu, menjadi bagian dari perjalanan berharga yang mengajarkan penulis untuk tetap bertahan, belajar, dan berkembang. Perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan sebuah karya ilmiah, tetapi juga tentang proses pendewasaan diri, belajar untuk tidak menyerah, serta terus berusaha

memberikan yang terbaik dalam setiap langkah. Penulis berharap segala usaha dan perjuangan yang telah dilakukan dapat menjadi pengalaman berharga yang akan membawa penulis menuju masa depan yang lebih baik, penuh harapan, serta keberhasilan dalam setiap langkah yang akan ditempuh.

Dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan doa semoga segala bentuk kebaikan, bantuan, dukungan, serta perhatian yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Semoga segala kebaikan tersebut menjadi amal yang bernilai dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka dan penuh kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Malang, 8 Maret 2026

Ike Zhiana Huzaini
NPM. 22201091048

BIOGRAFI PENULIS



Ike Zhiana Huzaini lahir di Bondowoso pada 29 November 2004. Penulis merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Mat Saleh dan Ibu Sumiyati. Pendidikan formal penulis dimulai di SDN Cermee 5, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Ibrohimy Wali Songo, dan MA Nurul Jadid. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Malang pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Malang, penulis aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan akademik maupun organisasi kemahasiswaan. Penulis pernah meraih prestasi sebagai Putri Fakultas Ilmu Administrasi Tahun 2022 serta terpilih sebagai *Best Talent* Duta Kampus Universitas Islam Malang Tahun 2023. Selain itu, penulis juga aktif dalam organisasi UKM Korps Protokoler Mahasiswa, yang bergerak di bidang keprotokolan dan kegiatan resmi kampus. Melalui organisasi tersebut, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan resmi universitas serta sering dipercaya sebagai *Master of Ceremony* (MC) dalam berbagai kegiatan di tingkat fakultas maupun universitas.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik, penulis menyusun skripsi yang berjudul “Sinergi Pemerintah Kota Malang dalam Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial melalui Aplikasi PDKTSAM Reborn”. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari proses perjalanan akademik di Universitas Islam Malang. Penulis berharap ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat di masa yang akan datang.



RINGKASAN

Ike Zhiana Huzaini, 2026, **Sinergi Pemerintah Kota Malang dalam Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial (Studi pada Aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang Reborn)**. Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int., dan Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP. 26498, 174, xxv.

Penelitian ini membahas mengenai sinergi Pemerintah Kota Malang dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial melalui program PDKTSAM Reborn. Penelitian ini didasarkan pada pentingnya pemutakhiran data kesejahteraan sosial sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran serta mencerminkan kondisi masyarakat secara aktual. Selain itu, kajian mengenai sinergi antar OPD dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial masih relatif terbatas, karena penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek teknis sistem informasi sehingga dinamika kelembagaan seperti pembagian peran, pola komunikasi, serta interaksi antar instansi belum banyak dianalisis secara mendalam. Kondisi ini juga menjadi semakin kompleks dengan adanya perubahan kebijakan pendataan nasional dari DTKS menuju DTSEN yang menuntut penyesuaian mekanisme koordinasi dan integrasi data lintas OPD di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana sinergi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam proses pemutakhiran data kesejahteraan sosial melalui PDKTSAM Reborn.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model analisis data menurut Miles Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan teori *intergovernmental relations* yang dikemukakan oleh Wright (1979), yang mencakup lima indikator utama dalam pelaksanaannya, yaitu peran pemerintah (*the roles of government*), interaksi antar pejabat publik (*the interactions of public officials*), komunikasi keberlanjutan (*sustainability communication*), peran administrator (*the roles administrator*), serta fokus perhatian terhadap kebijakan (*focus attention on the policy*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi Pemerintah Kota Malang dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial melalui aplikasi PDKTSAM Reborn telah terbentuk melalui pembagian tugas dan fungsi yang jelas antar OPD. Bappeda berperan dalam koordinasi perencanaan dan penyusunan indikator pembangunan, Diskominfo menyediakan dukungan sistem serta infrastruktur teknologi informasi, Dinas Sosial P3AP2KB mengelola data sekaligus melaksanakan verifikasi dan validasi di lapangan, sedangkan BPS mendukung proses pendataan melalui penyediaan indikator statistik dan metodologi. Pelaksanaan sinergi tersebut didukung oleh koordinasi formal maupun informal seperti rapat koordinasi, pelatihan petugas pendataan, serta pemanfaatan komunikasi digital untuk memperlancar pertukaran informasi dan penyelesaian kendala teknis di lapangan, dengan peran administrator sistem yang menjaga kelancaran alur data dan integrasi

sistem. Implementasi PDKTSAM Reborn berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan akurasi data, mengurangi duplikasi, serta membantu penentuan sasaran bantuan secara lebih tepat sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah serta terkoordinasi lintas sektor. Namun demikian, proses pemutakhiran data masih menghadapi berbagai kendala seperti mobilitas penduduk, data yang tidak valid, responden yang sulit ditemui, serta kebutuhan penyesuaian terhadap kebijakan nasional menuju DTSEN, sehingga penguatan koordinasi dan komitmen berkelanjutan antar OPD tetap diperlukan untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan data kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: *Sinergi; Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial; PDKTSAM Reborn.*



SUMMARY

Ike Zhiana Huzaini, 2026, **Synergy of the Malang City Government in Updating Social Welfare Data (Study on the Malang City Reborn Social Welfare Data Collection Application)**. Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int., dan Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP. 26498, 174, xxv.

This study discusses the synergy of the Malang City Government in updating social welfare data through the PDKTSAM Reborn program. This study is based on the importance of updating social welfare data as a reference in the distribution of social assistance so that it is on target and reflects the actual conditions of the community. In addition, studies on the synergy between OPDs in updating social welfare data are still relatively limited, because previous studies have focused more on the technical aspects of information systems, so that institutional dynamics such as role sharing, communication patterns, and interactions between agencies have not been analyzed in depth. This condition has become even more complex with the change in national data collection policy from DTKS to DTSEN, which requires adjustments to the coordination and data integration mechanisms across OPDs at the regional level. Therefore, this study aims to identify, describe, and analyze the synergy between OPDs within the Malang City Government in the process of updating social welfare data through PDKTSAM Reborn.

This study uses descriptive research with a qualitative approach that utilizes primary and secondary data sources. The data analysis technique used refers to the data analysis model according to Miles Huberman and Saldana (2014), which includes four stages, namely data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. This study also uses the theory of intergovernmental relations proposed by Wright (1979), which includes five main indicators in its implementation, namely the roles of government, the interactions of public officials, sustainability communication, the roles of administrators, and focus attention on the policy.

The results of the study show that the synergy of the Malang City Government in updating social welfare data through the PDKTSAM Reborn application has been formed through a clear division of tasks and functions between OPDs. Bappeda plays a role in coordinating planning and compiling development indicators, Diskominfo provides system support and information technology infrastructure, the Social Affairs Agency P3AP2KB manages data and carries out verification and validation in the field, while BPS supports the data collection process by providing statistical indicators and methodologies. The implementation of this synergy is supported by formal and informal coordination, such as coordination meetings, training for data collection officers, and the use of digital communication to facilitate information exchange and resolve technical obstacles in the field, with the role of system administrators ensuring smooth data flow and system integration. The implementation of PDKTSAM Reborn contributes to improving data quality and accuracy, reducing duplication, and helping to determine aid targets more precisely, thereby supporting data-based decision-

making and the formulation of more targeted and coordinated cross-sectoral poverty alleviation policies. However, the data updating process still faces various obstacles such as population mobility, invalid data, respondents who are difficult to locate, and the need to adjust to national policies towards DTSEN, so that strengthening coordination and ongoing commitment between OPDs is still necessary to maintain the quality and sustainability of social welfare data.

Keywords: *Synergy; Social Welfare Data Update; PDKTSAM Reborn.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah karena berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program perlindungan dan dukungan sosial. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025), menjadi bentuk intervensi pemerintah yang keberhasilannya sangat bergantung pada validitas dan pembaruan data penerima manfaat (Hastuti dkk., 2024). Data yang akurat menjadi prasyarat utama agar bantuan tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan (Smeru Research Institute, 2023). Dalam praktiknya, kualitas data kesejahteraan sosial tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pendataan, tetapi juga oleh kuatnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan pemanfaatan data (Santoso dkk., 2023).

Urgensi penggunaan data yang akurat dalam penanggulangan kemiskinan juga ditegaskan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menekankan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai dasar penentuan sasaran program (Kementerian Sekretariat Negara, 2025). Namun demikian, implementasi pendataan kesejahteraan sosial melalui sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di berbagai daerah masih menghadapi

berbagai permasalahan, seperti ditemukannya penerima bantuan yang telah meninggal dunia, aparatur sipil negara yang tidak berhak menerima bantuan, serta terjadinya tumpang tindih data antar program bantuan sosial (Ombudsman Republik Indonesia, 2024). Pemutakhiran data juga belum berjalan optimal akibat lemahnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta keterbatasan sumber daya manusia di tingkat daerah (Ariansyah dkk., 2025), ditambah dengan keterbatasan anggaran dan kapasitas pengelolaan data (Rauf, 2023). Kondisi tersebut berdampak pada penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pendataan kesejahteraan sosial tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola data dan koordinasi kelembagaan. Dalam konteks ini, pemerintah mendorong transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 yang mewajibkan instansi pemerintah untuk berkontribusi dalam transformasi digital pelayanan publik secara terkoordinasi (Imania & Haryani, 2021). Selain itu, kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2019 menekankan prinsip satu standar data, satu metadata, dan satu portal data guna mendorong integrasi dan akuntabilitas data pemerintahan (Open Data Kubu Raya, 2022). Secara normatif, SDI dirancang untuk mengatasi fragmentasi data lintas sektor dan memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data melalui penyusunan Rencana Induk Data serta pengembangan sistem dan kapasitas sumber daya manusia di daerah (Pemerintah Kabupaten Trenggalek, 2025).

Meskipun demikian, implementasi SDI di tingkat pusat dan daerah masih menghadapi berbagai kendala. Di tingkat pusat, keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan belum terbentuknya budaya kerja berbasis data menjadi hambatan dalam optimalisasi infrastruktur Pusat Data Nasional (Katadata.co.id, 2023). Di tingkat daerah, lemahnya koordinasi antar OPD dan belum optimalnya fungsi wali data (Nuryana & Junaidi, 2025), keterlambatan pemutakhiran data dan keterbatasan pendanaan (Azizah & Permana, 2025), serta kuatnya ego sektoral yang memandang data sebagai milik masing-masing lembaga (Satu Data Indonesia, 2024) menyebabkan prinsip integrasi data belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan integrasi data secara nasional dan praktik implementasinya di daerah, sehingga penguatan sinergi antar OPD menjadi kebutuhan strategis.

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan mekanisme integrasi data yang adaptif terhadap kebijakan nasional sekaligus mampu menjawab tantangan koordinasi lintas sektor di tingkat lokal (Habiba & Nurnawati, 2025). Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah sistem informasi manajemen (SIM) untuk mengintegrasikan data lintas OPD secara terpusat (Rangkuti & Nasution, 2025). Namun, efektivitas SIM tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, melainkan sangat bergantung pada kualitas sinergi antar OPD sebagai pengelola dan pengguna data (Septiani & Isnawaty, 2024).

Sebagai respons dari permasalahan implementasi SDI, Pemerintah Kota Malang mengembangkan aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang

(PDKTSAM) Reborn sebagai sistem informasi manajemen pendataan kesejahteraan sosial yang terintegrasi. PDKTSAM Reborn dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang melalui sinergi dengan Diskominfo, Dinsos P3AP2KB, dan BPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Basis Data Kesejahteraan Sosial (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK, 2025). Aplikasi PDKTSAM Reborn dilengkapi dengan fitur *by name*, *by address*, dan *by needs* yang dirancang untuk meningkatkan akurasi identifikasi sasaran, mengurangi data ganda, serta mendukung penargetan berbasis kebutuhan secara lebih transparan dan akuntabel (Palumpun, 2024). Selain itu, PDKTSAM Reborn memiliki fitur monitoring dan evaluasi berbasis data geospasial yang terintegrasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) sehingga memungkinkan pemantauan kondisi sosial ekonomi masyarakat hingga tingkat kelurahan secara *real time* sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (Pemerintah Kota Malang, 2024).

Sebelum diterapkannya PDKTSAM Reborn, pengelolaan data kesejahteraan sosial di Kota Malang masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti fragmentasi data antar lembaga yang menyebabkan terjadinya duplikasi, ketidakakuratan data yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar instansi (Malang Terkini, 2025). Sistem pendataan sebelumnya belum didukung oleh fitur monitoring dan evaluasi serta belum terintegrasi dengan data berbasis lokasi, sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengidentifikasi sasaran bantuan secara akurat dan mengevaluasi program bantuan secara terpadu (Pemerintah Kota

Malang, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan semata pada ketiadaan sistem, melainkan pada belum optimalnya sinergi antar OPD dalam pengelolaan dan pemanfaatan data kesejahteraan sosial.

Tabel 1. 1 Hasil Pendataan melalui PDKTSAM Reborn

No.	Kategori	Jumlah KK	Persentase
1.	Target Responden	78.946	100%
2.	<i>Entry Data</i>	77.601	98,30%
3.	Data Ganda	1.611	2,04%
4.	Data Pecahan	266	0,34%
5.	Tervalidasi	77.170	97,75%
6.	Responden Dapat Ditemui	55.836	70,73%
7.	Responden Tidak Dapat Ditemui	21.334	27,02%

Sumber: Bappeda Kota Malang dalam Palumpun, 2024

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Malang kemudian menerapkan PDKTSAM Reborn sebagai pembaruan dari sistem pendataan sebelumnya. Implementasi PDKTSAM Reborn menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam proses pendataan kesejahteraan sosial, khususnya pada periode tahun 2022-2023. Berdasarkan hasil pendataan pada Tabel 1.1, dari total target sebanyak 78.946 Kepala Keluarga (KK), sebanyak 77.601 KK berhasil masuk ke dalam sistem atau mencapai 98,30%. Meskipun demikian, masih ditemukan adanya permasalahan berupa data ganda sebanyak 1.611 KK (2,04%) serta data pecahan sebanyak 266 KK (0,34%). Namun demikian, dari keseluruhan data yang masuk, sebanyak 77.170 KK (97,75%) telah berhasil melalui proses validasi.

Tabel 1. 2 Hasil Validasi PDKTSAM Reborn

Valid/Tidak Valid	Jumlah (KK)	Keterangan
Valid	55.836 KK	6.951 KK (tidak miskin) 14.194 KK (hampir miskin) 23.386 KK (miskin)

Valid/Tidak Valid	Jumlah (KK)	Keterangan
		4. 11.305 KK (sangat miskin)
Tidak Valid	21.335 KK	1. Meninggal dunia 2.869 KK 2. Pindah dalam kota 3.128 KK 3. Pindah luar kota 4.746 KK 4. Tidak mau wawancara 1.869 KK 5. Tidak ditemukan 8.288 KK 6. Proses hukum 50 KK 7. ODGJ 33 KK 8. Sakit parah 35 KK 9. Belum diwawancarai 317 KK

Sumber: Bappeda Kota Malang dalam Palumpun, 2024

Hasil validasi pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kelompok responden yang dinyatakan valid memiliki tingkat kesejahteraan yang beragam. Sebanyak 6.951 KK dikategorikan sebagai tidak miskin, 14.194 KK termasuk dalam kategori hampir miskin, 23.386 KK tergolong miskin, dan 11.305 KK masuk dalam kategori sangat miskin. Sementara itu, data yang dinyatakan tidak valid disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain responden meninggal dunia sebanyak 2.869 KK, pindah dalam kota sebanyak 3.128 KK, pindah luar kota sebanyak 4.746 KK, tidak bersedia diwawancarai sebanyak 1.869 KK, tidak ditemukan sebanyak 8.288 KK, berada dalam proses hukum sebanyak 50 KK, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebanyak 33 KK, sakit parah sebanyak 35 KK, serta belum diwawancarai sebanyak 317 KK.

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, implementasi PDKTSAM Reborn menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam proses pendataan kesejahteraan sosial di Kota Malang. Tingginya capaian *entry* data sebesar 98,30% dan validasi sebesar 97,75% mencerminkan adanya koordinasi dan keterlibatan lintas OPD dalam proses pengumpulan serta verifikasi data. Capaian tersebut tidak terlepas dari

pembagian peran antara Bappeda sebagai koordinator perencanaan, Diskominfo sebagai penyedia sistem dan infrastruktur teknologi, Dinsos P3AP2KB sebagai pengelola data dasar dan pendamping validasi, serta BPS sebagai penyedia indikator statistik makro.

Namun demikian, masih ditemukannya data ganda, data pecahan, serta data tidak valid akibat perpindahan penduduk, responden yang tidak ditemukan, dan berbagai kendala sosial lainnya menunjukkan bahwa pemutakhiran data kesejahteraan sosial tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada efektivitas sinergi antar OPD dalam menjaga konsistensi, pembaruan, dan integrasi data secara berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan teknis sistem informasi perlu didukung oleh koordinasi kelembagaan yang intensif agar kualitas data tetap terjaga. Dengan demikian, temuan pada kedua tabel tidak hanya menggambarkan capaian administratif, tetapi juga merefleksikan dinamika kerja sama antar OPD dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial di Kota Malang.

Sinergi antar OPD menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan PDKTSAM Reborn di Kota Malang karena pengelolaan data kesejahteraan sosial melibatkan instansi dengan kewenangan yang berbeda. Untuk melihat implementasi sinergi tersebut, peneliti melakukan pra observasi dan wawancara dengan OPD terkait guna mengidentifikasi bentuk kerja sama, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial, sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

“Pelaksanaan PDKTSAM Reborn di Kota Malang dilakukan melalui kerja sama dan pembagian peran yang terintegrasi antar OPD. Bappeda berperan dalam penyusunan indikator kesejahteraan sosial serta validasi DTKS dan P3KE di lima kecamatan, Diskominfo menyiapkan *database* dan aplikasi

pendataan, sementara Dinsos P3AP2KB menyediakan DTKS sebagai data dasar penentuan responden serta mendampingi proses validasi melalui Puskesmas di masing-masing kelurahan.” (Hasil Wawancara pada 10 Oktober 2025 dengan Ibu Sofiah Nur selaku Analis PPM Bappeda Kota Malang).

Sementara dikutip dari penelitian terdahulu, BPS memiliki peran untuk memberikan data resmi serta indikator statistik makro terkait tingkat kemiskinan (Palumpun, 2024).

Adanya aplikasi PDKTSAM Reborn yang terintegrasi dan terpusat menjadi solusi dalam mengatasi pemecahan data dan tumpang tindih informasi kesejahteraan sosial. Namun, tantangan utama dalam implementasinya terletak pada optimalisasi sinergi antar OPD, khususnya antara Bappeda, Dinsos P3AP2KB, Diskominfo, dan BPS yang memiliki peran dan kewenangan berbeda sehingga membutuhkan koordinasi yang intensif agar data yang dihasilkan lengkap, mutakhir, dan konsisten. Tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya perubahan sistem pendataan nasional dari DTKS menjadi Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2025 (Fatah, 2025). Perubahan ini menuntut penyesuaian sistem, format, dan mekanisme integrasi data di daerah. Proses transisi ini tidak hanya memerlukan transformasi teknis dan administratif, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kesiapan teknologi informasi guna menjamin interoperabilitas dan keberlanjutan pemutakhiran data kesejahteraan sosial (Yunita dkk., 2023). Selain itu, pada penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek teknis sistem informasi, sehingga dinamika kelembagaan seperti pembagian peran, pola komunikasi, serta interaksi antar instansi dalam proses pemutakhiran data belum banyak dianalisis secara mendalam

Meskipun PDKTSAM Reborn telah dikembangkan sebagai sistem informasi pendataan kesejahteraan sosial yang terintegrasi, kajian yang secara khusus menganalisis kualitas sinergi antar OPD dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial masih terbatas. Penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek teknis sistem informasi, integrasi data, atau evaluasi kebijakan secara umum, namun belum secara mendalam mengkaji bagaimana pembagian peran, pola komunikasi, interaksi pejabat publik, serta fokus kebijakan antar OPD mempengaruhi efektivitas pemutakhiran data di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan penelitian mendalam untuk menganalisis sinergi Pemerintah Kota Malang dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial, khususnya dalam menghadapi tantangan koordinasi, pembagian peran, dan penyelarasan kewenangan antar OPD seiring dengan perubahan kebijakan pendataan dari DTKS menuju DTSEN. Dalam konteks ini, aplikasi PDKTSAM Reborn diposisikan sebagai media koordinasi dan pemanfaatan data bersama, sehingga efektivitas pemutakhiran data ditentukan oleh kualitas kerja sama lintas OPD. Penelitian ini menggunakan pendekatan *intergovernmental relations* dari Wright (1978) yang mencakup indikator peran pemerintah (*the roles of government*), interaksi pejabat publik (*interaction of public officials*), komunikasi berkelanjutan (*sustainability communication*), peran administrator (*the roles of administrator*), serta fokus perhatian terhadap kebijakan (*focus attention on the policy*). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi sinergi antar OPD, pola komunikasi, proses pengambilan keputusan, serta pengaruh

kerja sama tersebut dalam membangun keterpaduan hubungan kerja secara vertikal dan horizontal guna mendukung akurasi pemutakhiran data kesejahteraan sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Kajian mengenai sinergi antar OPD dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek teknis sistem informasi, sehingga dinamika kelembagaan seperti pembagian peran, pola komunikasi, serta interaksi antar instansi dalam proses pemutakhiran data belum banyak dianalisis secara mendalam. Kondisi ini menjadi semakin kompleks dengan adanya perubahan kebijakan pendataan nasional dari DTKS menuju DTSEN yang menuntut penyesuaian mekanisme koordinasi dan integrasi data lintas OPD di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang dapat menganalisis bagaimana sinergi antar OPD dibangun dalam proses pemutakhiran data kesejahteraan sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sinergi Pemerintah Kota Malang dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial melalui aplikasi PDKTSAM Reborn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan sinergi Pemerintah Kota Malang dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial melalui aplikasi PDKTSAM Reborn. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengkaji beberapa aspek sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan peran masing-masing OPD dalam proses pemutakhiran data kesejahteraan sosial melalui aplikasi PDKTSAM Reborn.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan bentuk interaksi antar pejabat publik dari masing-masing OPD dalam mendukung proses pemutakhiran data kesejahteraan sosial.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan komunikasi yang berkelanjutan antar OPD dalam proses pemutakhiran data kesejahteraan sosial.
4. Menganalisis dan mendeskripsikan peran administrator dalam tata kelola kolaboratif pada pemutakhiran data kesejahteraan sosial.
5. Menganalisis dan mendeskripsikan fokus perhatian terhadap kebijakan dalam mendukung sinergi antar OPD pada pemutakhiran data kesejahteraan sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

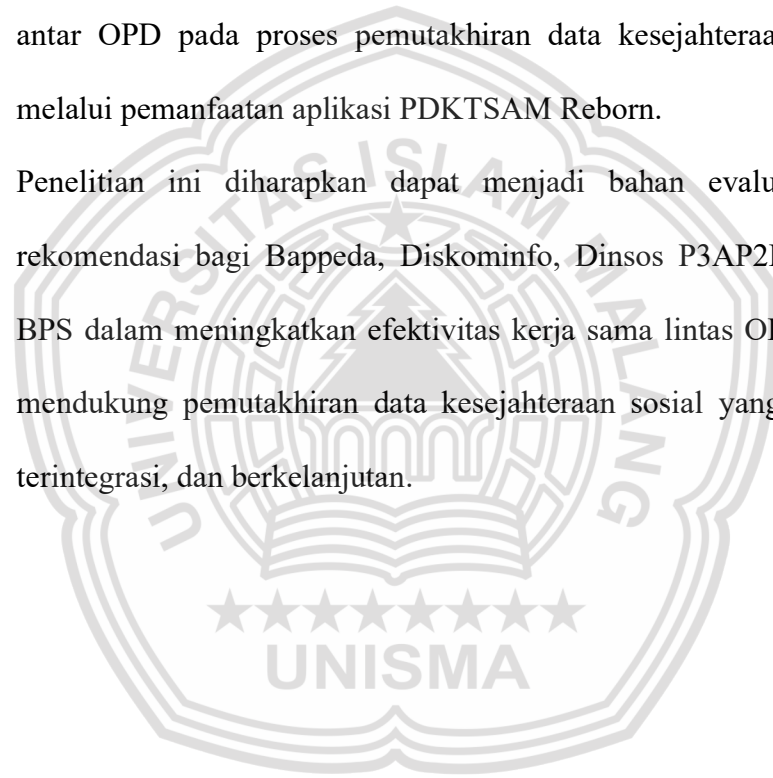
Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian *intergovernmental relations*, khususnya terkait sinergi antar OPD dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial tingkat pemerintah daerah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dasar pengembangan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji

intergovernmental relations dan sinergi pemerintah daerah dalam pengelolaan serta pemutakhiran data kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Malang dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antar OPD pada proses pemutakhiran data kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan aplikasi PDKTSAM Reborn.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Bappeda, Diskominfo, Dinsos P3AP2KB, dan BPS dalam meningkatkan efektivitas kerja sama lintas OPD guna mendukung pemutakhiran data kesejahteraan sosial yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi Pemerintahan Kota Malang dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial melalui aplikasi PDKTSAM Reborn telah terbentuk melalui pembagian tugas dan fungsi yang jelas antar OPD. Bappeda menjalankan peran koordinatif dalam perencanaan dan penyusunan indikator pembangunan, Diskominfo menyediakan dukungan sistem serta infrastruktur teknologi informasi, Dinas Sosial P3AP2KB mengelola data sekaligus melaksanakan verifikasi dan validasi di lapangan, sementara BPS memperkuat proses pendataan melalui penyediaan indikator statistik dan metodologi. Sinergi peran tersebut menunjukkan adanya keterpaduan kelembagaan dalam mendukung pemutakhiran data kesejahteraan sosial secara terpadu.

Pelaksanaan sinergi tersebut didukung oleh koordinasi yang berlangsung secara formal maupun informal, seperti rapat koordinasi, pelatihan petugas pendataan, serta pemanfaatan komunikasi digital untuk memperlancar pertukaran informasi dan penyelesaian kendala teknis di lapangan. Selain itu, keberadaan administrator sistem berperan penting dalam menjaga kelancaran alur data, memfasilitasi integrasi sistem, dan memastikan proses pemutakhiran berjalan secara terstruktur. Implementasi PDKTSAM Reborn terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan akurasi data, mengurangi duplikasi, serta

membantu penentuan sasaran bantuan secara lebih tepat sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

Lebih lanjut, data hasil pemutakhiran tidak hanya berfungsi sebagai basis informasi administratif, tetapi juga dimanfaatkan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan dan penganggaran program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Integrasi data tersebut mendorong penyelarasan program lintas sektor sehingga intervensi yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan terkoordinasi. Namun demikian, pemutakhiran data masih menghadapi sejumlah kendala, seperti mobilitas penduduk, data yang tidak valid, responden yang sulit ditemui, serta kebutuhan penyesuaian terhadap kebijakan nasional menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan komitmen berkelanjutan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap diperlukan guna menjaga kualitas dan keberlanjutan data kesejahteraan sosial.

6.2 Saran

Mengacu pada hasil temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dipaparkan. Terdapat saran yang dapat digunakan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan sinergi Pemerintah Kota Malang dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial melalui aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM) Reborn di antaranya adalah:

1. Pemerintah Kota Malang perlu memastikan bahwa sinergi lintas OPD dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial melalui PDKTSAM Reborn tidak hanya berhenti pada koordinasi administratif, tetapi diwujudkan dalam mekanisme kerja terpadu yang memiliki standar operasional prosedur

(SOP) yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta sistem evaluasi berkala. Pemerintah daerah dapat membentuk forum koordinasi rutin lintas OPD yang secara khusus membahas perkembangan pemutakhiran data, kendala teknis, serta capaian integrasi data. Selain itu, hasil evaluasi perlu didokumentasikan dan dijadikan dasar dalam penyempurnaan kebijakan dan mekanisme kerja agar integrasi data kesejahteraan sosial dapat berjalan secara konsisten, terstruktur, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

2. Permasalahan seperti data ganda, mobilitas penduduk yang tinggi, serta responden yang sulit ditemui menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dalam proses pemutakhiran data masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang melalui OPD terkait perlu menyelenggarakan pelatihan teknis secara berkala bagi petugas pendataan di tingkat kelurahan dan kecamatan, khususnya terkait teknik verifikasi lapangan, identifikasi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta penggunaan aplikasi PDKTSAM Reborn secara optimal. Selain pelatihan, diperlukan juga pembekalan mengenai etika pendataan, teknik komunikasi dengan responden, serta pemahaman indikator kesejahteraan sosial, sehingga petugas mampu melakukan pendataan secara lebih akurat, sistematis, dan responsif terhadap dinamika kondisi masyarakat di lapangan.
3. Kapasitas petugas pendataan dan pengelola sistem masih menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas data kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun program peningkatan kapasitas yang

berkelanjutan dan berbasis kebutuhan teknis, seperti pelatihan penggunaan aplikasi, standar pengisian data, serta pemahaman indikator kesejahteraan sosial yang digunakan dalam sistem PDKTSAM Reborn. Program pelatihan tersebut juga perlu dilengkapi dengan panduan teknis tertulis dan mekanisme pendampingan bagi petugas, sehingga kesalahan *input* data, inkonsistensi informasi, serta perbedaan interpretasi indikator dapat diminimalkan dan kualitas data yang dihasilkan menjadi lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

4. Peran administrator sistem dan tata kelola integrasi data perlu diperkuat secara kelembagaan, terutama dalam memastikan interoperabilitas data antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Pemerintah daerah dapat menetapkan unit atau tim khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan integrasi data PDKTSAM Reborn, termasuk dalam hal pemeliharaan sistem, pengawasan alur data, serta koordinasi teknis dengan OPD terkait. Penguatan peran ini juga penting untuk memastikan kesiapan sistem dalam menghadapi perubahan kebijakan nasional menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga proses integrasi data di tingkat daerah tetap berjalan stabil, terkoordinasi, dan tidak mengalami gangguan akibat perubahan kebijakan pendataan nasional.
5. Pemanfaatan data hasil pemutakhiran melalui PDKTSAM Reborn perlu diawasi konsistensinya dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kota Malang perlu memastikan bahwa data yang telah terintegrasi digunakan

sebagai dasar utama dalam penentuan sasaran program bantuan sosial, penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial, serta penentuan prioritas intervensi pembangunan. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi agar setiap OPD benar-benar memanfaatkan data tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, data kesejahteraan sosial tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Artikel

- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). *Instrumen Pengumpulan Data*.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/s3kr6>
- Ariansyah, D., Sagita, M., Julia, R. A., & Sarmila, S. (2025). Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos kepada Masyarakat Miskin. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), Article 10.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15482268>
- Austin, S. E., Ford, J. D., Berrang-Ford, L., Biesbroek, R., Tosun, J., & Ross, N. A. (2018). Intergovernmental relations for public health adaptation to climate change in the federalist states of Canada and Germany. *Global Environmental Change*, 52, 226–237. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.07.010>
- Azizah, Y., & Permana, I. (2025). Upaya Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 7–7.
<https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.173>
- Dwinugraha, A. P. (2017). Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1–7.
<https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i1.1421>
- Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature Review is A Part of Research. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 1(3), Article 3.
<https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>
- Hastuti, R., Handayani, R., & Noorrahman, M. F. (2024). Pengaruh Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pudak Setegal Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(4), 868–878.
- Imania, A. N., & Haryani, T. N. (2021). E – Government di Kota Surakarta Dilihat dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(1), Article 1.
<https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.53143>
- Jazuli, M. J. H., & Eprilianto, D. F. (2024). Intergovernmental Relations Dalam Pengembangan Sektor Kebudayaan Dan Pariwisata Di Kabupaten Trenggalek (Studi Pada Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Publika*, 103–118.
<https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p103-118>
- Junaid, I. (2019). Model Sinergi Unsur Pentaheliks Pariwisata Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Kota Parepare Dan Kabupaten Bone. *Sosiohumaniora*, 21(1), 22–33. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.17016>
- Milakovich, M. (2014). Digital Governance and Collaborative Strategies for Improving Service Quality: *Proceedings of the International Conference on Knowledge Management and Information Sharing*, 109–118.
<https://doi.org/10.5220/0005021001090118>
- Milhan, Y. (2011). Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri. *Jurnal Ketranmigrasian*.

https://www.academia.edu/2329282/Sinergitas_Instansi_Pemerintah_Dalam_Pembangunan_Kota_Terpadu_Mandiri

- Nuryana, & Junaidi. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 356–383. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5266>
- Oktavia, A. N., Raharjo, D. A., Irfantowi, Idris, M., Sugiarto, R., Pertama, Y., & Ikasari, I. H. (2024). Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah Di Bidang Kesejahteraan Sosial. *JRIIN :Jurnal Riset Informatika Dan Inovasi*, 2(2), 292–298.
- Pietersen, C. (2018). Research trends in the South African Journal of Human Resource Management. *SA Journal of Human Resource Management*, 16(0), Article 0. (race; gender; authorship; author contribution; representation according to author institution and country of origin). <https://doi.org/10.4102/sajhrm.v16i0.825>
- Rakamdani, & Adianto. (2019). Sinergitas Aktor Dalam Pengembangan Desa Wisata Okura Di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), Article 2.
- Rangkuti, Z. S., & Nasution, M. I. P. (2025). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efisiensi Operasional Di Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(1), 180–184. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3144>
- Santoso, A., Kurniawati, E., & Dhani, A. U. (2023). Kajian Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 17(1), 79–94. <https://doi.org/10.35475/ripteck.v17i1.176>
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 7(4), 193–208. <https://doi.org/10.24198/responsive.v7i4.60881>
- Syahriar, R. Q., & syahriar, ary. (2006). Peran Teknologi Informasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, 8(3). <https://doi.org/10.29122/jsti.v8i3.762>
- Widiarsa. (2019). Kajian pustaka (literature review) sebagai layanan intim Pustakawan berdasarkan kepakaran dan minat Pemustaka. *Media Informasi*, 28(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>
- Yunita, P., Pohan, I. A., & Syauki, W. R. (2023). Kinerja Kelembagaan, Relasi Struktural, dan Koalisi Advokasi Pemerintah Daerah: Studi kasus Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang. *Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 8(2), 216–231. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i2.2993>
- Buku Teks dan Monografi**
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=15302>
- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., Istiqomah, R. R., & Abadi, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif &*

- Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
http://epustaka.staiddimaros.ac.id:8123/inlislite3/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDkzYzhkZDhjNmZjY2UzNzU3YjM5ZmNkOGFkOGZkZTNjNzNlMzQ2NA==.pdf
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3133716>
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*.
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3133716>
- Darmadi, H. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Alfabeta.
https://perpustakaan.umsida.ac.id/index.php?p=show_detail&id=58102&keywords=
- Helmawati. (2015). *Sistem informasi manajemen pendidikan agama islam*. PT Remaja Rosdakarya. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/211270/sistem-informasi-manajemen-pendidikan-agama-islam>
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Salemba Humanika. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/205831/metodologi-penelitian-kualitatif-untuk-ilmu-ilmu-sosial>
- James A.F, S., Freeman, R. E., Gilbert JR, & Daniel R. (1996). *MANAJEMEN Jilid 1* / James A.F Stoner. PT Prenhallindo.
<https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=9287>
- McLeod, R. (2001). *Sistem Informasi Manajemen*. PT Prenhallindo.
<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/201033/sistem-informasi-manajemen-jilid-1>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE. <https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf>
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya. <https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=40>
- Mukarom, Z. (with Mukarom, Z., & Rohman, C. A.). (2020). *Teori-Teori Komunikasi* (A. I. Setiawan, Ed.). Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/31495/>
- Narimawati, U. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, teori dan aplikasi* (Vol. 9).
https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4484/12/UNIKOM_RIZKY%20SUPRIYATNA_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
- Pratama, I. P. A. E. (2019). *Sistem Informasi dan Implementasinya: Teori & Konsep Sistem Informasi Disertasi Berbagai Contoh Praktiknya Menggunakan Perangkat Lunak Open Source*.
<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206156/sistem-informasi-dan-implementasinya-teori-dan-konsep-sistem-informasi-disertai-berbagai-contoh-praktiknya-menggunakan-perangkat-lunak>

- Rochaety, E., Setyowati, T., & Ridwan, F. (2011). *Sistem Informasi Manajemen*. Mitra Wacana Media. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/211620/sistem-informasi-manajemen>
- Silalahi, U. (2011). *Asas-Asas Manajemen*. PT Refika Aditama. <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=1250>
- Solong, A., & Yadi, A. (2021). *Kajian Teori Organisasi dan Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Deepublish. <https://repository.deepublish.com/media/publications/595749-kajian-teori-organisasi-dan-birokrasi-da-03596900.pdf>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. https://digi-lib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67, 18.
- Sukmadinata, & Syaoidih, N. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya. <https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=4269>
- Sutedi, A. (2015). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10085>
- Suwendra, W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Nilacakra. <http://repo.uinsatu.ac.id/23143/6/BAB%20III.pdf>
- Umar, H. (2008). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. PT RajaGrafindo Persada. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/210048/metode-penelitian-untuk-skripsi-dan-tesis-bisnis>
- Welchman, L. (2015). *Managing chaos: Digital governance by design*. Rosenfeld Media. <https://archive.org/details/managingchaosdig0000welc>
- Wright, D. S. (1978). *Understanding intergovernmental relations: Public policy and participants' perspectives in local, state, and national governments*. <https://archive.org/details/understandingint00wrig>
- Tesis, dan Disertasi**
- Aprilianto, M. R. (2016). *Hubungan Koordinasi Dengan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bandung*. Universitas Pasundan. <https://repository.unpas.ac.id/9982/2/Cover.pdf>
- Habiba, N. A., & Nurnawati, E. (2025). *Pemanfaatan Website Satu Data Indonesia Dalam Mendukung Open Government Data Di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat* [Other, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/21912/>
- Handoko, G. P. (2016). *Sinergitas Pangkalan Utama Tni Angkatan Laut Iv Dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penanganan Perompakan Pasca Penindakan*. <https://opac.lib.idu.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=2499&bid=7573>
- Palumpun, A. S. (2024). *Proses Pengembangan Inovasi By Need Pada Sistem Informasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)*.

<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/231174/1/Aris%20Sugiarto%20Palumpun.pdf>

Laporan Penelitian dan Working Papers

Smeru Research Institute. (2023). *Kajian Dampak Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan pada Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu* | The SMERU Research Institute. <https://smeru.or.id/id/publication-id/kajian-dampak-bantuan-iuran-program-jaminan-kesehatan-pada-masyarakat-miskin-dan>

Widyaningsih, D., Ruhmaniyati, & Toyamah, N. (2022). *Mendorong pemutakhiran berkelanjutan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial: Kertas kerja SMERU*. The SMERU Research Institute.

Dokumen Pemerintah dan Publikasi Resmi

Kementerian Sekretariat Negara. (2025). *Optimalkan Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Terbitkan Inpres 8/2025* | Sekretariat Negara. <https://www.setneg.go.id/baca/index/optimalkan-upaya-pengentasan-kemiskinan-dan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem-pemerintah-terbitkan-inpres-8-2025>

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Program Keluarga Harapan*. Kementerian Sosial Republik Indonesia. <http://kemensos.go.id/program-bantuan-sosial/pkh>

Ombudsman RI. (2025). *Digital Governance yang Partisipatif: Peran Publik, Kepemimpinan Digital, dan Pengawasan Pelayanan Publik*. <https://ombudsman.go.id/443/artikel/r/artikel--digital-governance-yang-partisipatif-peran-publik-kepemimpinan-digital-dan-pengawasan-pelayanan-publik>

Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Problematisa Bantuan Sosial dan DTKS*. <https://ombudsman.go.id/443/artikel/r/pwkinternal--problematisa-bantuan-sosial-dan-dtk>

Pemerintah Kabupaten Trenggalek. (2025). *Paparan dan Diskusi Implementasi Satu Data Indonesia*. <https://trenggalekkab.go.id/article/berita/paparan-dan-diskusi-implementasi-satu-data-indonesia>

Pemerintah Kota Malang. (2024, Juni 20). *Aplikasi PDKTSAM Reborn Diluncurkan* – Pemerintah Kota Malang. <https://malangkota.go.id/2024/06/20/aplikasi-pdktsam-reborn-diluncurkan/>

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK. (2025). *Perwali Kota Malang No. 1 Tahun 2025*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/324516/perwali-kota-malang-no-1-tahun-2025>

Sumber Online

Fatah, K. (2025, November 27). *Sistem DTKS Dihentikan, DTSN Diberlakukan Penuh: Cara Cek Status dan Nominal PKH Terbaru 2025*. *Fastconnect.Id*. <https://fastconnect.id/bansos/sistem-dtk-dihentikan-dtsn-diberlakukan-penuh-cara-cek-status-dan-nominal-pkh-terbaru-2025/>

Iba, Z., & Wardhana, A. (2024). *Teknik Pengumpulan Data Penelitian* (hlm. 241–264).

[https://www.researchgate.net/publication/382060598_Teknik_Pengumpulan
Data_Penelitian](https://www.researchgate.net/publication/382060598_Teknik_Pengumpulan_Data_Penelitian)

Katadata.co.id. (2023). *SDM Jadi Tantangan Implementasi Satu Data Indonesia—
Nasional* Katadata.co.id.

[https://katadata.co.id/berita/nasional/656e8ccff2bb6/sdm-jadi-tantangan-
implementasi-satu-data-indonesia](https://katadata.co.id/berita/nasional/656e8ccff2bb6/sdm-jadi-tantangan-implementasi-satu-data-indonesia)

Open Data Kubu Raya. (2022). *Satu Data Indonesia dan Implementasinya di
Pemerintah Daerah—Open Data Kubu Raya*.

[https://opendata.kuburaya.go.id/blog/satu-data-indonesia-dan-
implementasinya-di-pemerintah-daerah](https://opendata.kuburaya.go.id/blog/satu-data-indonesia-dan-implementasinya-di-pemerintah-daerah)

Penerbit Deepublish. (2022). *Cara Membuat Penelitian Terdahulu*. Penerbit
Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-terdahulu/>

Privy. (2024). *Apa Itu Digital Governance? Kelebihan, Konsep, Tantangan*. Privy
Blog. <https://privy.id/blog/digital-governance/>

Rauf, D. N. (2023). *Peran dan Tantangan Dinas Sosial dalam Implementasi
Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat di Kecamatan Bulango Timur |
Journal of Comprehensive Science*.

<https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/379>

Satu Data Indonesia. (2024). *Tech & Telco Summit 2024: Satu Data Indonesia
Tegaskan Ego Sektoral Jadi Tantangan*. [https://data.go.id/news/2024-03-
07T00:00:00.000+00:00/tech--telco-summit-2024-satu-data-indonesia-
tegaskan-ego-sektoral-jadi-tantangan/421](https://data.go.id/news/2024-03-07T00:00:00.000+00:00/tech--telco-summit-2024-satu-data-indonesia-tegaskan-ego-sektoral-jadi-tantangan/421)

Surat Kabar dan Majalah

Malang Terkini. (2025). *Reformasi Data Sosial di Kota Malang: Ribuan Data
Penerima Bansos Tidak Sinkron dengan Basis Data Baru DTSEN*. *Berita
Malang dan Kota Batu Terkini 2025 - MALANG TERKINI*.

[https://www.malangterkini.id/2025/10/Reformasi-Data-Sosial-di-Kota-
Malang-Ribuan-Data-Penerima-Bansos-Tidak-Sinkron-dengan-Basis-Data-
Baru-DTSEN.html](https://www.malangterkini.id/2025/10/Reformasi-Data-Sosial-di-Kota-Malang-Ribuan-Data-Penerima-Bansos-Tidak-Sinkron-dengan-Basis-Data-Baru-DTSEN.html)

UNISMA